

KATALOG: 9302020.7172

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BITUNG MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

<https://bitungkota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BITUNG

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN
2018-2022**

<https://bitungkota.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

ISSN : 2654-8836
Nomor Publikasi : 71720.2204
Katalog BPS : 9302020.7172

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : xiv + 62 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://bitungkota.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BITUNG
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Ir. Hendra Tumbelaka

Penyunting:

Satrio Farli Tangkudung, SST

Penulis:

Frisca Ully Hapsari Saragih, SST

Pengolah Data:

Frisca Ully Hapsari Saragih SST

Gambar Kulit:

Satrio Farli Tangkudung, SST

Infografis:

Satrio Farli Tangkudung, SST

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan

Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu

Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu

Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
- (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
- (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
- (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
- (5) Perubahan Inventori
- (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB harga berlaku nominal

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah

PDRB harga konstan

digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi

Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor

menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi

PDRB harga berlaku menurut pengeluaran

menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan antar wilayah

Distribusi PDRB menurut pengeluaran

menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan

PDRB pengeluaran ADHK

berguna untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri maupun antar wilayah

PDRB per kapita ADHB

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk

PDRB per kapita ADHK

berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

A. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

B. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

C. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/regional. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/regional. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/regional.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun antar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran ADHK bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri dan antar wilayah.
7. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://bitungkota.bps.go.id>

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga

Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS
Jumlah penduduk pertengahan tahun, Sensus Penduduk, BPS
Data Sekunder (dari BPS maupun luar BPS)
Indeks Harga Konsumen (IHK)

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPR)

Sumber data: Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SKLNP)
Hasil updating direktori LNPR
Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Sumber data: Data realisasi APBN Tahunan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Ditjen PBN)
Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan
Statistik Keuangan Daerah, BPS
Output Bank Indonesia, (BI)
Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, serta indeks harga dari BPS

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Sumber data: Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB
Nilai impor 2 digit Harmonized System (HS)
Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik industri Kecil dan Rumah tangga
Laporan Keuangan Perusahaan
Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar
Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas)
Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum
Publikasi Statistik Konstruksi
Statistik Peternakan, Direktorat Jendral (Ditjen) Peternakan

Perubahan Inventori

Sumber data: Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website BEI
Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/(BUMD
Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian.
Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
Data komoditas perkebunan.
Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.
Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
Data eksternal lain seperti data persediaan

Ekspor Impor

Sumber data: Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS
Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS
Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
Laporan Sistem Operasional Pelabuhan Laut (Simopel)
Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- b. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- c. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- d. Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- Sensus Penduduk 2010, 2020, BPS.
- Data Sekunder (dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metoda Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi) maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment* maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri.
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.
4. Diperoleh nilai PKRT tahun berjalan yang telah di-adjust.
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat).
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan Lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain

iv. Penghitungan PK-LPRT Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menghitung PK-LNPRT tahunan adalah

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SKLNP), informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis Lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *updating* direktori LNPRT, Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis Lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} = Rata-rata pengeluaran menurut jenis Lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} = PK-LNPRT hasil survei menurut jenis Lembaga dan jenis pengeluaran

n_i = Jumlah sampel LNPRT menurut jenis Lembaga

i = Jenis Lembaga LNPRT, $i=1,2,3,\dots,7$

j = Jenis pengeluaran LNPRT, $j=1,2,3,\dots,19$

2. Mengestimasi PK-LPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} x N_i$$

X = PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i = Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku. PK-LNPRT atas dasar harga konstan 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota; b). PK-P Kabupaten/Kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten/Kota.

iv. Penghitungan PKP Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten/Kota tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Ditjen PBN)
- Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- Output Bank Indonesia, (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, serta indeks harga dari BPS

2. Metoda Penghitungan

PK-P Atas dasar harga berlaku

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar) belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nigari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

PK-P Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of*

Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan PMTB tahunan adalah

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Nilai impor 2 digit *Harmonized System* (HS), yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik industri Kecil dan Rumah tangga
- d. Laporan Keuangan Perusahaan
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas)
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum
- i. Publikasi Statistik Konstruksi
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- k. Statistik Peternakan, Direktorat Jendral (Ditjen) Peternakan

2. Metoda Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari

impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-deflate PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikasikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode *Harmonized System* 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk atas

dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio Pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan pengangkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh.
- c. Selang (Lag) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula

pasir, dan gandum.

iv **Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian.
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
5. Data komoditas perkebunan.
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
8. Data eksternal lain seperti data persediaan seperti data persediaan beras dari Perum BULOG, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Ditjennak, Kementan).

2. Metoda Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas. Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca

akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
2. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
3. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflate perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- a. Men-deflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai.
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya.
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai
- d. Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, untuk melengkapi estimasi industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan ekspor impor tahunan adalah

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- d. Laporan Sistem Operasional Pelabuhan Laut (Simopel), yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

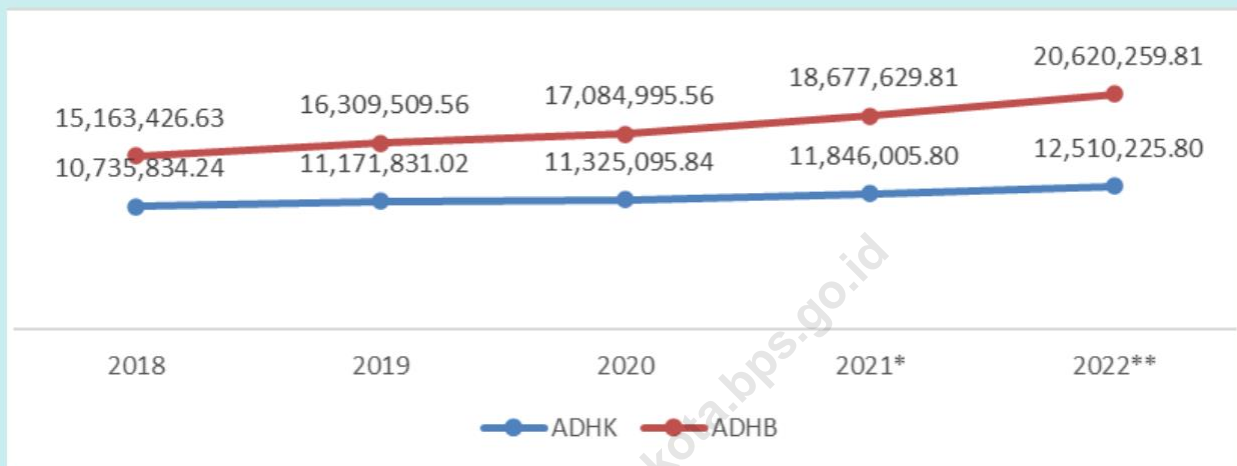
2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan Net Ekspor

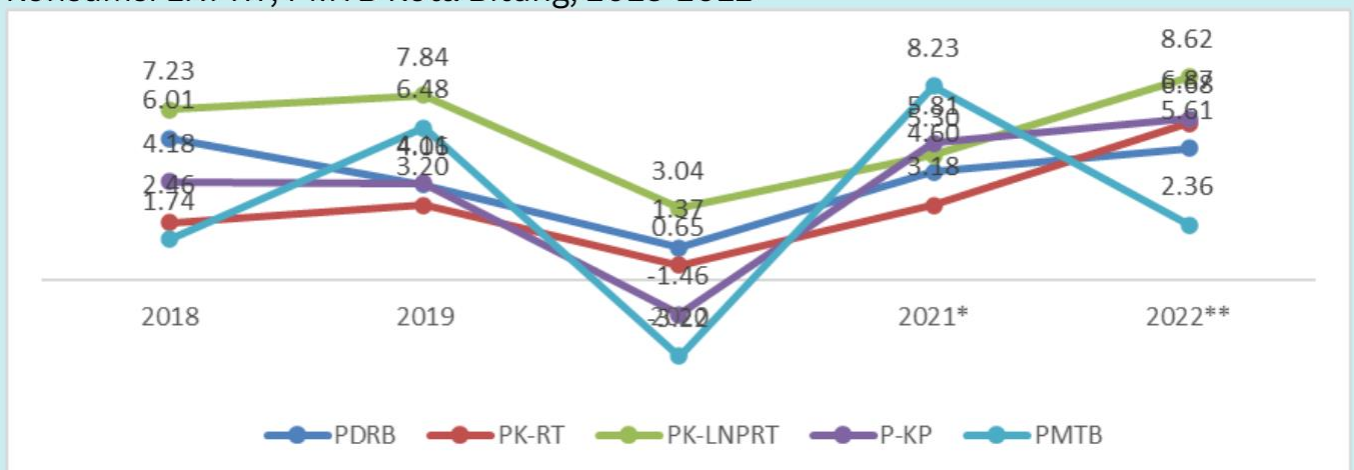
BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BITUNG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018-2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2018-2022 (Juta Rupiah)



Laju pertumbuhan PDRB, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, PMTB Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kota Bitung mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Bitung digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi untuk Investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori) kelebihan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Bitung di ekspor keluar Wilayah Bitung, sedangkan jika ada permintaan domestik lebih tinggi sementara produksi domestik tidak mencukupi maka akan mendatangkan (impor) barang dan jasa dari wilayah luar Kota Bitung. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Bitung pada periode 2018-2022 menunjukkan kondisi yang masih cukup baik. Secara umum perekonomian terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan arah yang positif. Peningkatan ekonomi tersebut dapat tergambarkan melalui nilai PDRB menurut harga berlaku maupun harga konstan secara nilai total PDRB dan juga setiap komponen. Penjabaran PDRB bisa dijelaskan dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran dijabarkan oleh PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB menurut pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah maupun antar negara. Konsumsi akhir rumah tangga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan konsumsi rumah tangga menggambarkan perekonomian rumah tangga yang semakin membaik. Begitu pula konsumsi LNPRT dan Pemerintah yang meningkat menunjukkan kemampuan institusi tersebut dalam membiayai keperluan konsumsinya yang lebih baik. Investasi yang dijabarkan oleh PMTB dan perubahan inventori

menggambarkan bagaimana kekuatan perekonomian berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga dapat terlihat dari besaran nilai ekspor. Investasi dan ekspor yang meningkat merupakan implikasi dari peningkatan pendapatan dari kegiatan produksi.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	Juta Rupiah				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.854.494,86	6.264.690,21	6.486.120,93	6.696.994,92	7.496.294,92
2. Konsumsi LNPRT	184.955,62	214.010,14	230.969,04	243.969,04	268.969,04
3. Konsumsi Pemerintah	1.576.528,60	1.677.466,33	1.314.178,89	1.319.266,88	1.606.180,44
4. PMTB	4.264.825,75	4.828.514,13	4.917.080,89	5.329.813,14	5.585.813,14
5. Perubahan Inventori	2.383,75	1.954,77	2.341,79	2.541,79	2.741,79
6. Net Ekspor	3.280.238,04	3.322.873,98	4.134.304,02	5.085.044,03	5.660.260,47
Total PDRB	15.163.426,63	16.309.509,56	17.084.995,56	18.677.629,81	20.620.259,81

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kota Bitung atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2018-2022 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHB Kota Bitung Tahun 2018 sebesar 15.163.426,63 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 20.620.259,81 juta rupiah. Peningkatan PDRB ADHB di tahun 2022 terjadi pada seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Perubahan Inventori, PMTB dan net ekspor barang dan jasa. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga dan perubahan volume.

PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK) Kota Bitung selama kurun waktu 2018-2022 juga mengalami peningkatan. Tahun 2018 nilai PDRB ADHK Kota Bitung sebesar 10.735.834,24 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mencapai 12.510.225,80 juta rupiah. Peningkatan PDRB ADHK terjadi seiring dengan bertambahnya volume. Peningkatan PDRB ADHK ini memberikan gambaran adanya tarikan yang cukup kuat dari sisi permintaan terhadap perekonomian secara agregat sehingga

perekonomian masih bertumbuh. Kondisi Perekonomian di Kota Bitung tahun 2022 sudah menunjukkan kondisi yang cukup bagus setelah Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun yang lalu, dimana PDRB masih tumbuh positif.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

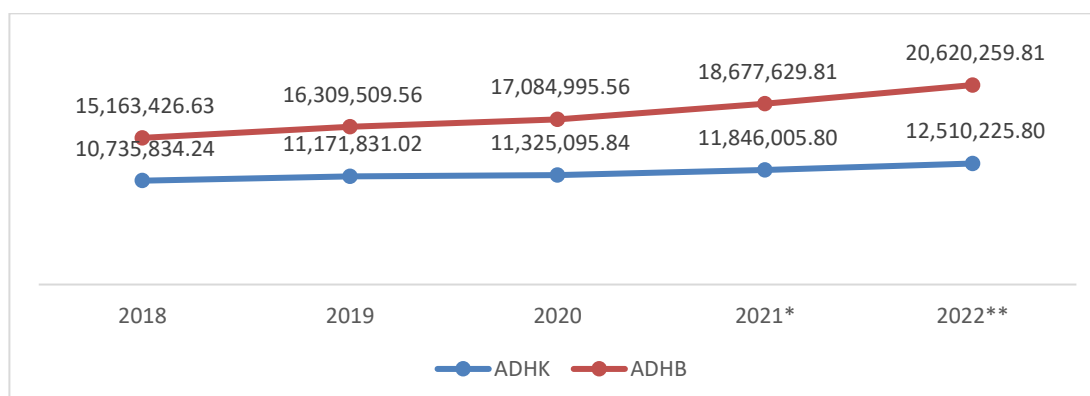
Komponen Pengeluaran	Juta Rupiah				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.222.503,64	4.357.613,13	4.385.816,05	4.525.116,05	4.827.216,05
2. Konsumsi LNPRT	118.941,94	128.265,21	132.170,13	139.170,13	151.170,13
3. Konsumsi Pemerintah	1.006.073,76	1.047.400,98	1.032.109,34	1.092.109,34	1.167.109,34
4. PMTB	3.669.391,15	3.907.026,30	3.781.404,55	4.092.498,53	4.189.198,53
5. Perubahan Inventori	2.463,60	1.993,18	2.360,75	2.510,75	2.630,75
6. Net Ekspor	1.716.460,14	1.729.532,22	1.991.235,02	1.994.601,00	2.172.901,00
Total PDRB	10.735.834,24	11.171.831,02	11.325.095,84	11.846.005,80	12.510.225,80

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Semakin lama, selisih antara PDRB ADHB dan ADHK semakin besar karena peningkatan harga dari tahun ke tahun. Dalam PDRB ADHK faktor harga sudah ditiadakan.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2018-2022 (Juta Rupiah)



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, Net Ekspor atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	38,61	38,41	37,96	35,86	36,35
2. Konsumsi LNPRT	1,22	1,31	1,35	1,31	1,30
3. Konsumsi Pemerintah	10,40	10,29	7,69	7,06	7,79
4. PMTB	28,13	29,61	28,78	28,54	27,09
5. Perubahan Inventori	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
6. Net Ekspor	21,63	20,37	24,20	27,23	27,45
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

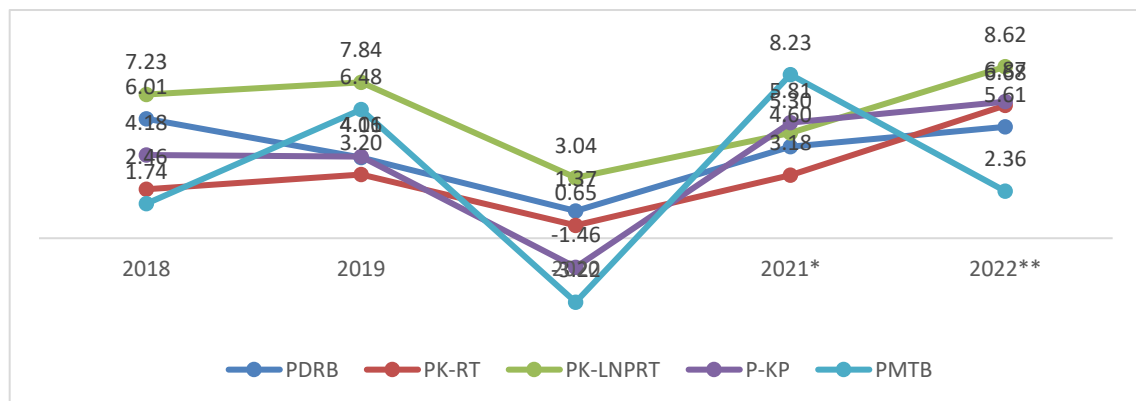
Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2018-2022, produk yang dikonsumsi di Kota Bitung, paling besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (diatas 35 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi fisik (PMTB) juga mempunyai peran yang cukup besar dengan kontribusi sekitar 27-29 persen. Adapun proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7-10 persen.

Pada tahun 2022, peranan konsumsi rumah tangga sebesar 36,35 persen, diikuti peranan PMTB sebesar 27,09 persen. Adapun komponen konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 7,79 persen, kemudian konsumsi LNPRT sebesar 1,30 persen. Komponen net ekspor memiliki peranan sebesar 27,45 persen, sementara itu perubahan inventori memiliki peranan paling kecil yaitu hanya sebesar 0,01 persen. Peningkatan peranan di tahun 2022 terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, net ekspor barang

dan jasa dan. Sedangkan konsumsi LNPRT, dan PMTB mengalami sedikit penurunan peranan.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dari tahun 2018-2022 berada pada kisaran 1,37-6,01 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,01 persen di tahun 2018. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota bitung sedikit mengalami perlambatan menjadi 4,06 persen, kembali melambat menjadi 1,37 di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 pertumbuhannya mengalami percepatan menjadi 4,60 persen, dan mengalami percepatan kembali di tahun 2022 menjadi 5,61 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Sementara pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2020. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bitung di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid 19 yang melanda yang berdampak ke ke semua komponen pembentuknya. Pandemi Covid 19 yang terjadi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, Lembaga non profit, Pemerintah realisasi investasi fisik (PMTB) serta berpengaruh terhadap kinerja ekspor impor. Sementara di tahun 2021 meskipun pandemi covid 19 masih melanda, namun sudah dilakukan penyesuaian menuju normal baru dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Grafik 2. Laju pertumbuhan PDRB, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, PMTB Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat menurut komponennya, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan pengeluaran Pemerintah, mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 dengan nilai pertumbuhan masing masing sebesar 6,68 persen, 8,62 persen dan 6,87

persen. Untuk komponen PMTB pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 8,23 persen. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2020 dimana pengeluaran Konsumsi LNPRRT tumbuh 3,04 persen, bahkan Pengeluaran Pemerintah dan Pembentukan modal tetap Bruto mengalami kontraksi. Konstraksi yang terjadi di tahun 2020 merupakan dampak yang terjadi akibat melandanya wabah Covid-19.

3.2. PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bitung, ternyata penggunaan terbesar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bitung maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Di tahun 2018 total konsumsi rumah tangga sebesar 5.854.494,86 juta rupiah (ADHB) dan 4.222.503,64 juta rupiah (ADHK). Nilai ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2022 total konsumsi rumah tangga mencapai 7.496.294,91 juta rupiah (ADHB) dan 4.827.216,04 juta rupiah (ADHK). Sementara dilihat dari sisi pertumbuhannya, pada periode tahun 2018 - 2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga selalu mengalami pertumbuhan positif, meskipun di tahun 2020 pertumbuhannya dibawah satu persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi ditahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,68 persen, sedangkan di tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,65 persen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi semenjak tahun 2020 berdampak pada konsumsi rumah tangga. Selama pandemi terjadi, masyarakat cenderung untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong adanya indikasi penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi. Dilihat dari pola konsumsinya, pandemi covid-19 hanya berdampak kecil terhadap pengeluaran rumah tangga pada kelompok konsumsi makanan. Hal ini disebabkan karena konsumsi makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi jenis konsumsi lainnya. Kelompok konsumsi non makanan seperti kelompok pakain dan alas kaki, serta transportasi,

komunikasi, rekreasi dan Budaya, Hotel dan Restoran cukup berdampak di banding dengan konsumsi pada tahun sebelumnya. namun itu merebaknya Covid-19 mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga Kesehatan serta terjadi perubahan pola kebiasaan hidup sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus.

Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi rumah Tangga (Juta rupiah)					
ADHB	5.854.494,86	6.264.690,21	6.486.120,93	6.696.994,92	7.496.294,92
ADHK 2010	4.222.503,64	4.357.613,13	4.385.816,05	4.525.116,05	4.827.216,05
Proporsi terhadap PDRB	38,61	38,41	37,96	35,86	36,35
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (juta rupiah)					
ADHB	110,93	116,92	117,24	120,63	131,81
ADHK 2010	80,01	81,33	79,82	81,07	84,88
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (juta rupiah)					
ADHB	27,14	28,77	28,69	29,52	32,62
ADHK 2010	19,57	20,01	19,53	19,84	21,01
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	2,46	3,20	0,65	3,18	6,68
b. Per RT	0,89	1,65	-1,85	1,57	4,28
c. Per kapita	0,89	2,23	-2,39	1,57	3,25
Jumlah RT (unit)	52.776	53.581	54.947	55.595	56.873
Jumlah penduduk (org)	215.711	217.754	224.532	227.177	229.795

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018-2022 berada pada kisaran 35 sampai 38 persen. kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 38,61 persen dan porsi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 35,86 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun menurut atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2018, secara umum setiap rumah tangga di Kota Bitung menghabiskan dana sekitar 110,93 juta

rupiah setahun, untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun non makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi juta rupiah di tahun 2022. Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga mengalami pertumbuhan terendah di tahun 2020 yaitu 0,65 persen dan mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,20 persen. Pertumbuhan yang rendah di tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi Virus Covid-19.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010 kecuali tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Bitung meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi perkapita di tahun 2017 sebesar 25,29 juta rupiah dan terus meningkat sehingga di tahun 2021 menjadi 29,52 juta rupiah. Di tahun 2021 konsumsi perkapita mengalami pertumbuhan sebesar 1,57 persen. Kenaikan ini disebabkan karena di tahun 2021 sudah dilakukan penyesuaian protokol kesehatan dalam menghadapi pandemic covid 19, pelonggaran aktivitas dan meluasnya cakupan vaksinasi sehingga berangsur memulihkan aktivitas perekonomian.

3.3 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT

Peranan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data menunjukkan proporsi pengeluaran akhir LNPRT terhadap PDRB periode tahun 2017 sampai dengan 2021 berada pada kisaran 1,22 sampai 1,35 persen.

Walaupun proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB relative kecil, namun konsumsi LNPRT di Kota Bitung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT terhadap PDRB cenderung cukup stabil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan konsumsi LNPRT juga selalu positif dimana pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 3,04 persen dan tertinggi sebesar 8,62 persen di tahun 2022. Dilihat berdasarkan nilainya, di tahun 2018, total konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 184.955,61 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan menjadi 268.969,04 juta rupiah di tahun 2022.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan di tahun 2022 merupakan yang tertinggi, hal ini dikarenakan di tahun 2022 segala kegiatan LNPRT yang tertunda karena pandemic covid-19 telah dapat dilaksanakan dengan normal kembali. Untuk pertumbuhan tertinggi kedua yaitu di tahun 2019 ini karena di tahun 2019 merupakan tahun diselenggarakannya pesta demokrasi baik di daerah maupun di level nasional yaitu berupa pemilihan anggota legislative yaitu DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Partai politik semakin gencar melakukan kegiatan kampanye, begitu pula ormas ormas pendukung capres-cawapres atau partai tertentu semakin menggiatkan aktivitasnya. Kenaikan di tahun 2020 karena ada pemilihan gubernur/wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Walikota dan Wakil Walikota Bitung. Sementara pertumbuhan di tahun 2021, yaitu sebesar 5,30 persen didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan ketat, sehingga LNPRT bisa menjalankan agenda kegiatannya di tahun 2021. Selain itu kegiatan berbagai Lembaga kemanusiaan selama masa pandemi covid 19 juga turut berpengaruh terhadap tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut.

Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta rupiah)	184,955.62	214,010.14	230,969.04	243,969.04	268,969.04
b. ADHK 2010 (Juta rupiah)	118,941.94	128,265.21	132,170.13	139,170.13	151,170.13
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1.22	1.31	1.35	1.31	1.30
Pertumbuhan	7.23	7.84	3.04	5.30	8.62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.4 PERKEMBANGAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah Bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Bitung serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, atas dasar harga Berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan ada yang mengalami kontraksi. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku sebesar 1.576.528,60 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2022 nilainya mencapai 1.606.180,44 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan di masing-masing tahun, kecuali ditahun 2020. dimana nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan di tahun 2018 sebesar 1.006.073,76 juta rupiah dan terus meningkat hingga nilainya di tahun 2019 menjadi 1.047.400,98 juta rupiah. Namun di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.032.109,33 juta rupiah, kemudian mengalami peningkatan Kembali di tahun 2021 menjadi 1.092.109,33 juta rupiah dan di tahun 2022, menjadi 1.167.109,33 juta rupiah .

Pengeluaran akhir pemerintah di tahun 2022 memiliki kontribusi sebesar 7,79 persen dari total PDRB menurut pengeluaran. Kontribusi di tahun 2022 ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki kontribusi sebesar 7,06 persen. Kondisi ini menempatkan pengeluaran pemerintah pada urutan ke empat dalam PDRB menurut pengeluaran setelah Komponen Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan selama 2018-2019, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,46 persen. dan Kembali mengalami peningkatan 5,81 persen di tahun 2021. Pola yang sama juga terjadi dengan konsumsi pemerintah perkapita dimana selama 2018-2019 tumbuh positif antara 3,13-5,29 persen namun di tahun 2020 terkonstraksi sebesar 4,43 persen, kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,14 persen. Konstraksi yang terjadi di tahun 2020 disebabkan karena terhambatnya realisasi anggaran pemerintah akibat pembatasan ruang gerak selama pandemic Covid-19 serta adanya kebijakan *refocusing*/relokasi anggaran pemerintah dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Sementara di tahun 2022 konsumsi pemerintah Kembali tumbuh positif, salah satunya disebabkan peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pemerintah.

Berbeda dengan Konsumsi pemerintah perkapita, jika dilihat rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama di tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 506,60 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi 654,28 juta rupiah di tahun 2021. Hal yang sama saat dilihat berdasarkan harga konstan 2010, konsumsi pemerintah perpegawai pemerintah ADHK 2010 pada tahun 2017 sebesar 303,11 juta rupiah terus meningkat setiap tahun dan menjadi 378,73 juta rupiah di tahun 2021.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Juta rupiah)					
ADHB	1,576,528.60	1,677,466.33	1,314,178.89	1,319,266.88	1,606,180.44
ADHK 2010	1,006,073.76	1,047,400.98	1,032,109.34	1,092,109.34	1,167,109.34
Proporsi terhadap PDRB	10.40	10.29	7.69	7.06	7.79
Konsumsi Pemerintah per kapita per tahun (juta Rp)					
ADHB	7,31	7,70	7,64	8,19	6,99
ADHK 2010	4,66	4,81	4,60	4,74	5,08
Konsumsi Pemerintah per Pegawai Pemerintah (juta Rp)					
ADHB	506,60	543,22	599,92	654,28	564,76
ADHK 2010	323,29	339,18	360,88	378,73	410,38
Pertumbuhan					
Total konsumsi Pemerintah	4.18	4.11	-1.46	5.81	6.87
Konsumsi per kapita	2,58	3,13	-4,43	3,14	7,17
Konsumsi per pegawai	6,66	4,92	6,40	4,95	8,35
Jumlah PNS (org)	3.112	3.088	2.860	2.844	2.844
Jumlah penduduk (org)	215.711	217.754	224.532	227.177	229.795
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, total konsumsi pemerintah, konsumsi pemerintah per kapita mengalami kontraksi di tahun 2020, sementara konsumsi pemerintah per pegawai

selalu mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Total konsumsi pemerintah, konsumsi pemerintah perkapita, dan konsumsi per pegawai mengalami pertumbuhan tertinggi ditahun 2022, dengan nilai masing masing 6,87 persen, 7,17 persen dan 8,35 persen. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan fluktuasi baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk/per pegawai). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang Sebagian digunakan sebagai investasi visik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) didalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produk domestic maupun impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun secara riil (kecuali tahun 2020). Pada tahun 2018, PMTB di Kota Bitung atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat senilai 4.264.825,74 juta rupiah, meningkat menjadi 5.585.813,14 juta rupiah di tahun 2022. Begitu juga dilihat berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK) nilai PMTB meningkat dari 3.669.391,14 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 3.907.026,30 juta rupiah di tahun 2019. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3.781.404,55 juta rupiah dan Kembali mengalami peningkatan menjadi 4.189.198,53 juta rupiah di tahun 2022. Proporsi PMTB terhadap total PDRB juga terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2019. Proporsi di tahun 2018 sebesar 28,13 persen menjadi 29,61 persen di tahun 2019. Namun di tahun 2020 sedikit menurun menjadi 28,78 persen dan Kembali menurun menjadi 28,54 persen di tahun 2021. Perubahan yang terjadi pada proporsi PMTB tersebut tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada PMTB bangunan maupun non bangunan.

Tabel 7. Perkembangan PMTB Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PMTB (Juta rupiah)					
a. ADHB	4,264,825.75	4,828,514.13	4,917,080.89	5,329,813.14	5,585,813.14
b. ADHK 2010	3,669,391.15	3,907,026.30	3,781,404.55	4,092,498.53	4,189,198.53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	28.13	29.61	28.78	28.54	27.09
Pertumbuhan	1.74	6.48	-3.22	8.23	2.36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan PMTB Kota Bitung dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan yang cukup fluktuatif, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi, dan ditahun 2021 kembali meningkat. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi ditahun 2021 sebesar 8,23 persen, sedangkan di tahun 2022 tumbuh sebesar sebesar 2,36 persen. Konstraksi di tahun 2020, salah satunya disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Dengan adanya covid menghambat proses pembangunan beberapa proyek infrastruktur baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Dari pemerintah diantaranya adanya realokasi anggaran penambahan barang modal bangunan dan non bangunan dari pemerintah untuk penanganan Covid 19. Selain itu juga pelaksanaan pengerjaan konstruksi juga sedikit terhambat karena penyesuaian protokol Kesehatan dan prosedur-prosedur dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Sementara itu ditahun 2021 PMTB Kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Beberapa proyek pembangunan yang mendorong pertumbuhan positif ini diantaranya Pembangunan Gudang Baru Pabrik, pengerjaan Konstruksi Jalan Tol Manado-Bitung, instalasi saluran Pipa Air bersih, Pembangunan SPBU, Pembangunan beberapa lokasi Baru Minimarket, dimulainya pembangunan Perumahan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Bitung, Pembangunan Fasilitas Kegamaan, yaitu masjid dan gereja, pembangunan Bantuan stimulus rumah swadaya dan Program 1000 Titik Wifi menuju Bitung Kota Digital

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 tanda angka, yaitu positif atau negatif (disamping komponen net ekspor). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang. Sebaliknya apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dialalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tatacara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tanda (positif atau negatif).

Tabel 8. Perkembangan Perubahan Inventori Kota Bitung, 2018-2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (Juta rupiah)					
a. ADHB	2,383.75	1,954.77	2,341.79	2,541.79	2,741.79
b. ADHK 2010	2,463.60	1,993.18	2,360.75	2,510.75	2,630.75
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat atas dasar harga Berlaku, di tahun 2018 perubahan inventori tercatat sebesar 2,383.75 juta rupiah dan memiliki tren fluktuatif setiap tahun dan menjadi sebesar 2,741.79 juta rupiah di tahun 2022. Proporsi komponen ini terhadap total PDRB juga sangat kecil, di bawah 0,1 persen. Proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB Kota Bitung selama 2018-2022 terbilang sangat kecil, dimana tahun 2018 proporsinya 0,02 persen dan terus menurun menjadi 0,01 persen di tahun 2022.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net ekspor didefinisikan sebagai ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor disini mencakup ekspor luar negeri dan ekspor keluar daerah. Sedangkan impor mencakup barang dan jasa yang masuk dari luar negeri maupun dari luar daerah. Ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah domestic, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan ekspor luar negeri, transaksi impor luar negeri menjelaskan adanya tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestic yang berasal dari no residen. Sementara itu net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapanya nilai uang yang terjadi di transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan perhitungan ekspor impor antar wilayah diberlakukan sebagai item penyeimbang perbedaan total PDRB menurut pengeluaran dan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Net ekspor yang dibahas disini merupakan gabungan antar net ekspor antar daerah dan net ekspor luar negeri. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor juga hasilnya dapat memiliki dua angka positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif, berarti nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai impor. Semikian pula sebaliknya, jika bernilai negatif artinya nilai impor lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor.

Selama tahun 2018-2022, net ekspor Kota Bitung baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilainya selalu positif, yang artinya nilai ekspor selalu lebih besar dari pada nilai impornya. Nilai net ekspor Kota Bitung tahun 2018 atas dasar harga berlaku sebesar 3,280,238.04 juta rupiah. Nilai ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,322,873.98 juta rupiah

di tahun 2019 kemudian Kembali meningkat menjadi 4,134,304.02 juta rupiah di tahun 2020 dan menjadi 5,085,044.03 juta rupiah di tahun 2021. Tahun 2022 nilai net ekspor Kembali meningkat menjadi 5,660,260.47 juta rupiah.

Tabel 9. Perkembangan Net Ekspor Kota Bitung, 2018-2022

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor (Juta rupiah)					
a. ADHB	3,280,238.04	3,322,873.98	4,134,304.02	5,085,044.03	5,660,260.47
b. ADHK 2010	1,716,460.14	1,729,532.22	1,991,235.02	1,994,601.00	2,172,901.00
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	21.63	20.37	24.20	27.23	27.45

* Angka Sementara

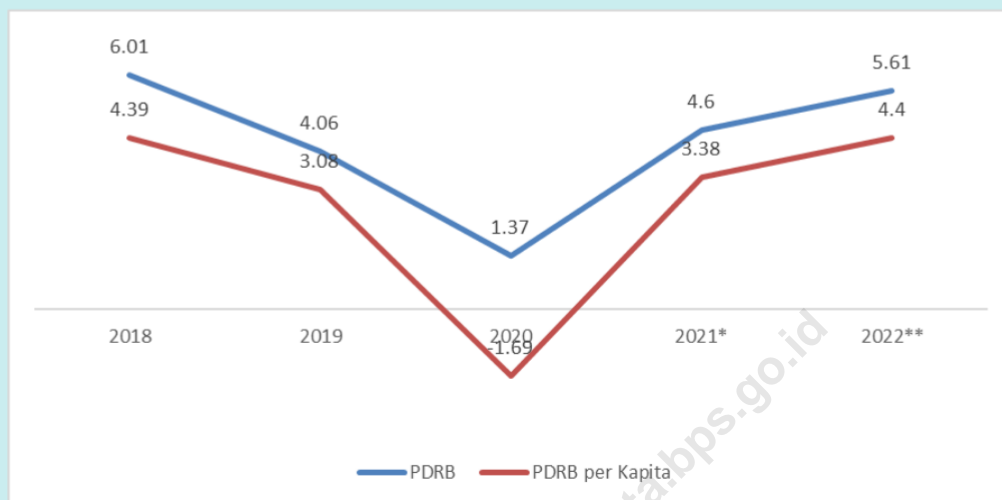
** Angka Sangat Sementara

Selanjutnya dilihat dari kontribusinya, komponen net ekspor Kota Bitung menyumbang sekitar 20-27 persen selama 2018-2022. Kontribusi selama 2018-2022 menunjukkan pola yang berfluktuatif dimana tahun 2018 sebesar 21,63 kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 20,37 persen ditahun 2019. Ditahun 2020 kontribusinya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 24,20 persen dan Kembali meningkat menjadi 27,23 persen di tahun 2021 dan terakhir naik menjadi 27,45 di tahun 2022. Selama lima tahun terakhir kontribusi terbesar terjadi di tahun 2022, sedangkan yang terkecil terjadi di tahun 2019.

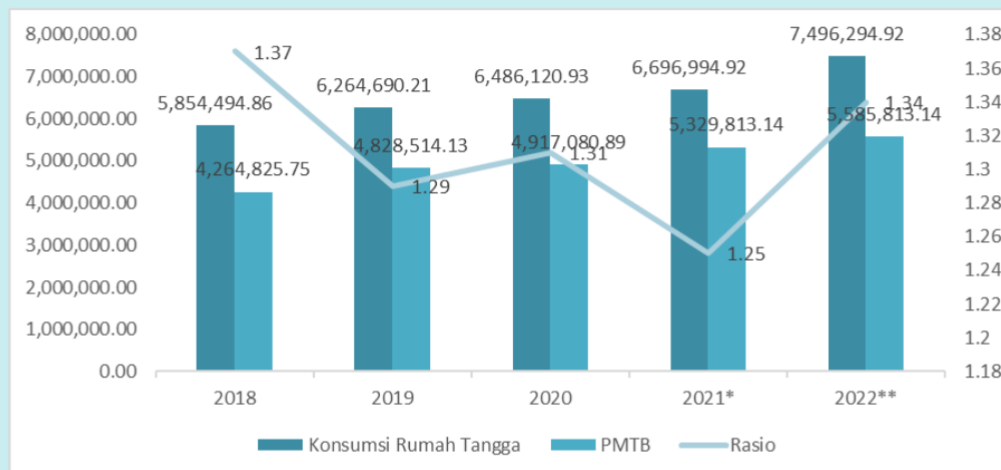
BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA BITUNG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2022

Pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita Kota Bitung, 2018-2022



Perkembangan Rasio Kunsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta rupiah)					
- ADHB	15,163,426.63	16,309,509.56	17,084,995.56	18,677,629.81	20,620,259.81
- ADHK 2010	10,735,834.24	11,171,831.02	11,325,095.84	11,846,005.80	12,510,225.80
PDRB per kapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	70,30	74,90	76,09	82,22	89,73
- ADHK 2010	49,77	51,30	50,44	52,14	54,44
Pertumbuhan					
PDRB per kapita ADHK 2010	4,39	3,08	-1,69	3,38	4,40
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	215.711	217.754	224.532	227.177	229.795

* Angka Sementara

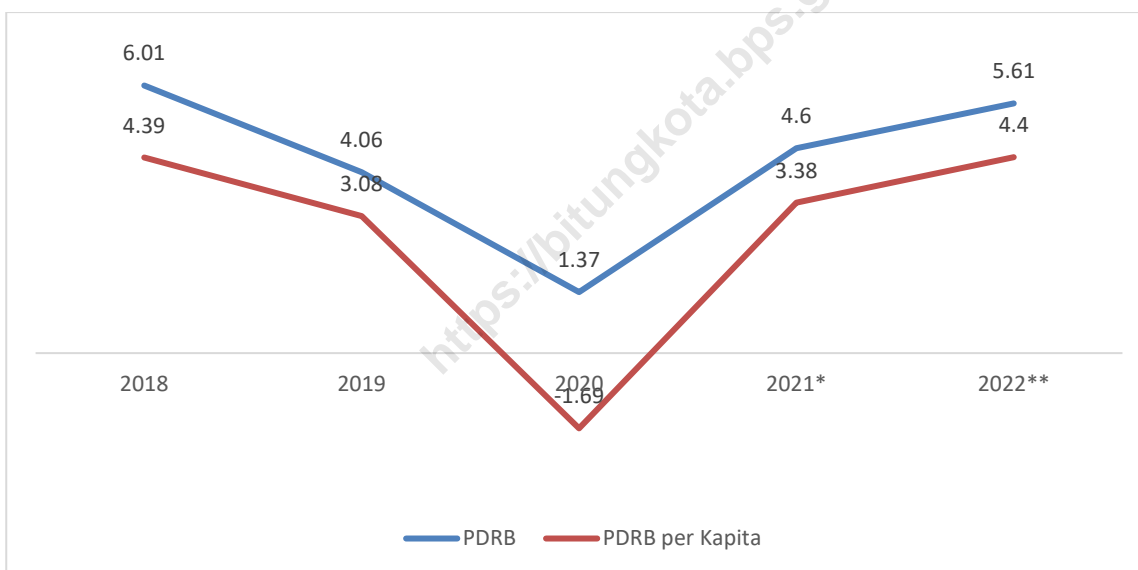
** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB per kapita Kota Bitung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 70,30 juta rupiah. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 89,73 juta

rupiah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara makro kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Bitung dari tahun ke tahun semakin membaik meskipun masih perlu mempertimbangkan juga faktor inflasi. Selama lima tahun terakhir ini, PDRB Perkapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020. PDRB per kapita Kota Bitung atas dasar harga konstan di tahun 2018 sebesar 49,77 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 54,44 juta rupiah di tahun 2021.

Jumlah penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 1,6-1,7 persen setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” pertumbuhannya lebih berfluktuatif, dimana tahun 2018-2019 tumbuh berkisar 3,1-4,4 persen, bahkan di tahun 2020, mengalami kontraksi sebesar 1,69 persen. Konstraksi ini terjadi karena di tahun 2020 pertumbuhan ekonominya lebih lambat di banding pertumbuhan penduduknya. Kemudian di tahun 2021 pertumbuhannya naik 3,38 persen dan ditahun 2022 menjadi 4,40 persen.

Grafik 3. Pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.2 PERBANDINGAN PDRB PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca, tambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018-2022

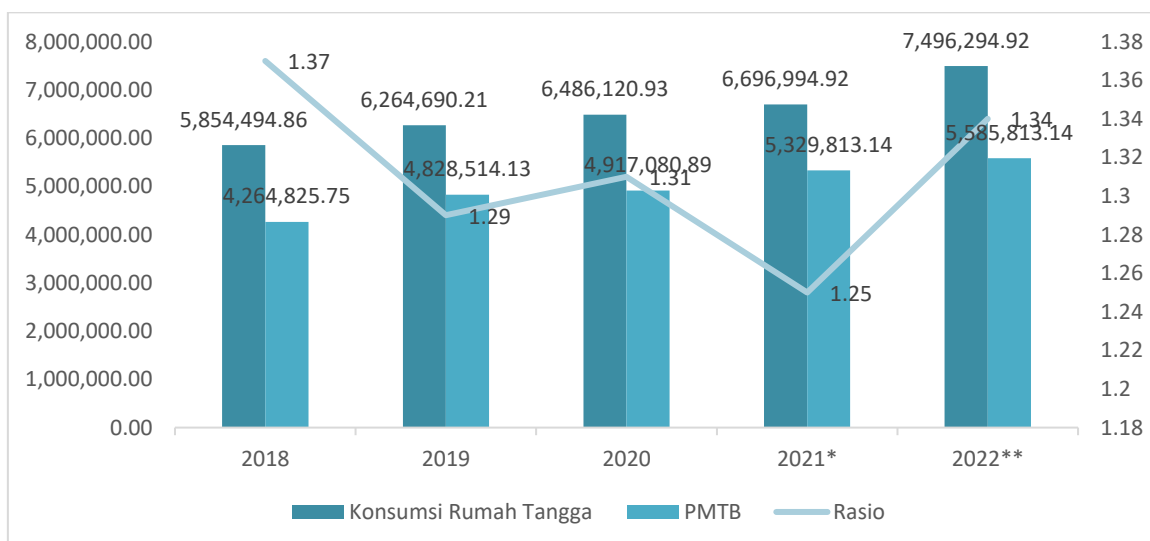
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (Juta rupiah)	5,854,494.86	6,264,690.21	6,486,120.93	6,696,994.92	7,496,294.92
Total PMTB (ADHB) Juta Rupiah	4,264,825.75	4,828,514.13	4,917,080.89	5,329,813.14	5,585,813.14
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1.37	1.29	1.31	1.25	1.34

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dalam kurun 2018-2022 relatif menurun dengan rata-rata rasio 1,25-1,37. Hal ini berarti bahwa konsumsi rumah tangga masih lebih besar dibandingkan investasi aset tetap sebesar 1,3-1,4 kali lipat. Ditahun 2018 perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 1,40 kali lipat, kondisi di tahun 2022 menunjukkan sedikit penurunan dimana perbandingannya menjadi 1,34 kali lipat. Nilai rasio Konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di tahun 2018-2022 yang menurun menunjukkan bahwa selamaa kurun waktu tersebut pertumbuhan investasi fisik lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Grafik 4. Perkembangan Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.3 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 12. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) Juta rupiah					
a. Rumah tangga	5,854,494.86	6,264,690.21	6,486,120.93	6,696,994.92	7,496,294.92
b. LNPRT	184,955.62	214,010.14	230,969.04	243,969.04	268,969.04
c. Pemerintah	1,576,528.60	1,677,466.33	1,314,178.89	1,319,266.88	1,606,180.44
Jumlah	7,615,979.09	8,156,166.68	8,031,268.86	8,260,230.84	9,371,444.40
PDRB (ADHB) Juta rupiah	15,163,426.63	16,309,509.56	17,084,995.56	18,677,629.81	20,620,259.81
Proporsi (%)	50.22	50.01	47.01	44.22	45.45

* Angka Sementara

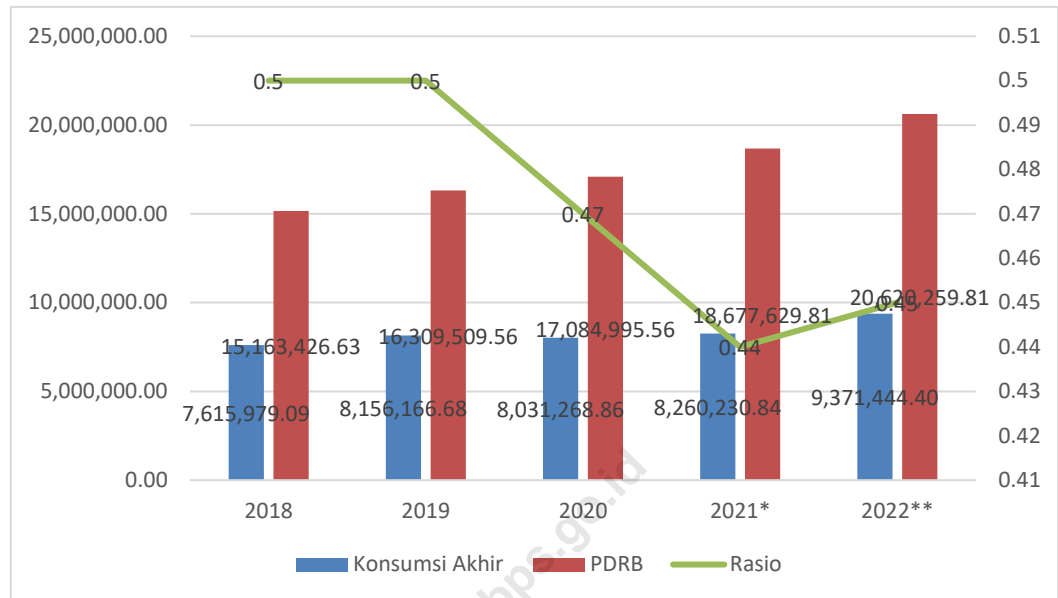
** Angka Sangat Sementara

Aktivitas konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga karena pengeluaran dengan jenis ini digolongkan kedalam Pembentukan Modal Tetap Bruto. Sementara PDRB (ADHB) menunjukkan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode. Perbandingan konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi pada suatu wilayah.

Dari tabel diatas didapat gambaran proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap total PDRB Kota Bitung tahun 2018 -2022 rata-rata sebesar 44-50 persen. Hal ini berarti bahwa total penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai setengah dari PDRB yang tercipta. Perkembangan nilai konsumsi akhir setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebagian besar konsumsi akhir digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan PDRB yang digunakan untuk PMTB dan ekspor hampir sama dengan penggunaan untuk konsumsi Akhir. Optimalisasi masih diperlukan seperti

terobosan untuk meningkatkan investasi dan ekspor Kota Bitung guna meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sector-sektor yang menjadi unggulan di Kota Bitung.

Grafik 5. Perkembangan Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bitung, 2018-2022



* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 13. Incremental Capital Output Ratio Kota Bitung, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(Juta rupiah)	10,735,834.24	11,171,831.02	11,325,095.84	11,846,005.80	12,510,225.80
Perubahan					
(Juta rupiah)	608.481,14	435,996.79	153,264.82	520,909.96	664,220.00
PMTB (ADHK 2010)					
(Juta rupiah)	3,669,391.15	3,907,026.30	3,781,404.55	4,092,498.53	4,189,198.53
ICOR	6,03	8,96	24,67	7,61	6,31

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR memiliki kecenderungan berfluktuasi dari 2018 hingga 2022, dimana sempat mengalami penurunan ditahun 2018 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 dan meningkat tinggi di tahun 2020 dan kembali melambat di tahun 2021 kemudian perlambatan juga berlanjut di tahun 2022. Nilai ICOR yang melambat bisa mengindikasikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Nilai ICOR tahun 2022 telah mencapai 6,31 yang berarti bahwa setiap penambahan 1 nilai output membutuhkan penambahan modal 6,31. Sehingga untuk penambahan output 1 miliar rupiah, dibutuhkan penambahan modal 6,31 miliar rupiah.

BAB V

PENUTUP

Nilai PDRB Kota Bitung Tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 20.620.259,80 juta rupiah sementara atas dasar harga konstan sebesar 12.510.225,80 juta rupiah. Peranan konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah mencapai 45,45 persen dimana 36,35 persen adalah konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2022 sebesar 5,61 persen.

Peranan investasi dalam PDRB pengeluaran Kota Bitung didekati dari proporsi PMTB terhadap PDRB periode 2018-2022 berada pada kisaran 27 sampai 29 persen

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

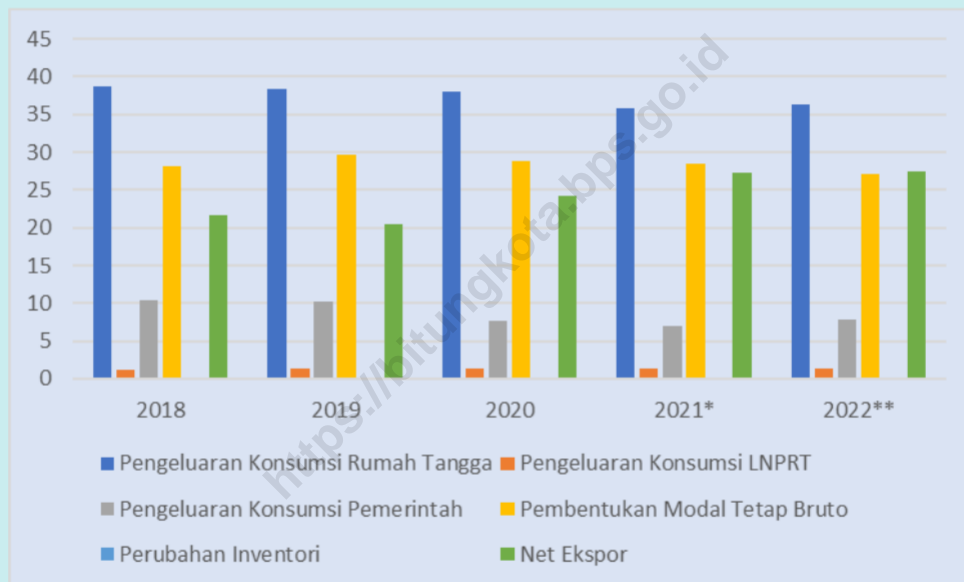
1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018- 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bitung pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Nilai PDRB Kota Bitung Tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 20.620.259,80 juta rupiah sementara atas dasar harga konstan sebesar 12.510.225,80 juta rupiah. Peranan konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah mencapai 45,45 persen dimana 36,35 persen adalah konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2022 sebesar 5,61 persen.
4. Peranan investasi dalam PDRB pengeluaran Kota Bitung didekati dari proporsi PMTB terhadap PDRB periode 2018-2022 berada pada kisaran 27 sampai 29 persen.
5. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain. Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022



“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,854,494.86	6,264,690.21	6,486,120.93	6,696,994.92	7,496,294.92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	184,955.62	214,010.14	230,969.04	243,969.04	268,969.04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,576,528.60	1,677,466.33	1,314,178.89	1,319,266.88	1,606,180.44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,264,825.75	4,828,514.13	4,917,080.89	5,329,813.14	5,585,813.14
5. Perubahan Inventori	2,383.75	1,954.77	2,341.79	2,541.79	2,741.79
6. Net Ekspor	3,280,238.04	3,322,873.98	4,134,304.02	5,085,044.03	5,660,260.47
P D R B (1 s.d 6)	15,163,426.63	16,309,509.56	17,084,995.56	18,677,629.81	20,620,259.81

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bitung, 2018-2022 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,222,503.64	4,357,613.13	4,385,816.05	4,525,116.05	4,827,216.05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	118,941.94	128,265.21	132,170.13	139,170.13	151,170.13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,006,073.76	1,047,400.98	1,032,109.34	1,092,109.34	1,167,109.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,669,391.15	3,907,026.30	3,781,404.55	4,092,498.53	4,189,198.53
5. Perubahan Inventori	2,463.60	1,993.18	2,360.75	2,510.75	2,630.75
6. Net Ekspor	1,716,460.14	1,729,532.22	1,991,235.02	1,994,601.00	2,172,901.00
P D R B (1 s.d 6)	10,735,834.24	11,171,831.02	11,325,095.84	11,846,005.80	12,510,225.80

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	38.61	38.41	37.96	35.86	36.35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.22	1.31	1.35	1.31	1.30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.40	10.29	7.69	7.06	7.79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28.13	29.61	28.78	28.54	27.09
5. Perubahan Inventori	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
6. Net Ekspor	21.63	20.37	24.20	27.23	27.45
P D R B (1 s.d 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.46	3.20	0.65	3.18	6.68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.23	7.84	3.04	5.30	8.62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.18	4.11	-1.46	5.81	6.87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.74	6.48	-3.22	8.23	2.36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B (1 s.d 6)	6.01	4.06	1.37	4.60	5.61

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Bitung, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.38	3.69	2.87	0.07	4.93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.36	7.30	4.74	0.32	1.50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.88	2.20	-20.50	-5.13	13.92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.30	6.33	5.22	0.15	2.38
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B (1 s.d 6)	1.57	3.36	3.34	4.51	4.54

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

“sengaja dikosongkan”

<https://bitungkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BITUNG

Jl. Stadion Duasudara, Manembo-nembo Tengah, Bitung

Telp. (0438)31269, Website: <https://bitungkota.bps.go.id>

email: bps7172@bps.go.id

